



BPK Segera

Audit Dana Desa

► Mendes Harap Pemanfaatan Dana Sesuai Priotas

EMPAT LANGKAH PENGAWASAN SATGAS DANA DESA

- Sinkronisasi kebijakan dan aturan lembaga/kementerian terkait desa
- Membantu Kemendes PDDT membuat kebijakan, peraturan dan pengawasan DD
- Tereliminasi perbuatan-perbuatan melanggar hukum
- Dan meningkatkan kemampuan pendamping desa

IMBUAN KPK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

- Pengelolaan harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
- Pemdes wajib mematuhi seluruh peraturan pengelolaan keuangan desa terutama penggunaan Dana Desa
- Aparatur Desa harus memahami dengan baik dan menggunakan Aplikasi Keuangan Desa (Siskudes)
- Bekerja sama dengan Kemendagri dalam pengelolaan keuangan desa
- Pemdes harus membuka ruang partisipasi aktif masyarakat
- KPK bersama Kemendes PDDT dan Kemendagri memanta dan mengawasi penggunaan keuangan desa dan Dana Desa.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan memberikan keluhan yang terkait penggunaan keuangan Desa



JEMBATAN DESA – Masyarakat desa membangun jembatan yang jadi sarana menghubungkan beberapa wilayah. Pembangunan ini memanfaatkan Dana Desa (DD), yang penggunaannya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada September 2017.



BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera mengaudit penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) 2017. Audit ini dilaksanakan pada desa terpilih, yang DD-nya sudah disalurkan.

Juru Bicara BPK, Yudi Ramdhan mengatakan, audit DD akan dilakukan pada September. Saat ini, BPK tengah melakukan Grup Diskusi Terfokus (GDT) dengan Kementerian Desa dan PDTT, Kemendagri, BPS, dan Bappenas untuk menyusun mekanisme audit DD tersebut.

“Tujuannya untuk mengidentifikasi seberapa efektif DD terhadap kemajuan ekonomi di desa. Kita ingin memastikan ada perputaran ekonomi di desa sehingga mendorong desa berkembang dan mandiri,” ujar Yudi.

Pemeriksaan DD, kata Yudi, tidak akan dilakukan terhadap seluruh desa sebab jumlahnya mencapai 74.000. Pemeriksaan akan dilakukan secara sampling terhadap desa-desa yang berada di daerah yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyelewengan.

Yudi mengakui audit itu perlu dilakukan, sebab terhadap pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pada DD 2016, salah satu temuannya ialah terdapat penggunaan DD yang tidak sesuai prioritas dan kurangnya kompetensi pendamping desa.

Yudi Ramdhan
Juru Bicara BPK

Tujuannya untuk mengidentifikasi seberapa efektif DD terhadap kemajuan ekonomi di desa. Kita ingin memastikan ada perputaran ekonomi di desa sehingga mendorong desa berkembang dan mandiri.

Namun audit tersebut hanya terhadap Kemendes PDTT, bukan kepada desa seperti yang akan dilakukan pada 2017. Ia mengatakan, saat ini sedang disiapkan program auditnya, dan akan dimulai pada awal September.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang sudah dilakukan, juga dirumuskan laporan keuangan yang sederhana, cepat, tepat, dan sesuai koridor. Sebab dari hasil temuan PDTT 2016, terdapat kelemahan kompetensi aparat desa dalam membuat laporan.

“Sedangkan desain aturannya yang cukup banyak. Sehingga nantinya BPK dalam audit akan merancang penilaian bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban yang lebih sederhana,” paparnya.

Wakil BPK, Bahrullah Akbar menyatakan, pihaknya tengah mencari formulasi untuk masuk dan mengaudit pengelolaan DD. Menurutnya, penggunaan DD relatif belum banyak tersentuh, padahal tanpa kontrol dari BPK, pengelolaan DD bakal lebih riskan dan rawan diselewangkan.

Bahrullah menyatakan, lazimnya anggaran dari negara harus diaudit BPK, dana desa juga harusnya juga melalui proses yang sama. “Khusus dana desa kami sedang mencari formulasinya,” kata Bahrullah.

Dia menambahkan, pengawasan terhadap pengelolaan DD sangat penting. Sebab BPK menengarai potensi penyelewengannya cukup tinggi. Di samping itu, berdasarkan pengalaman audit anggaran DD yang berasal dari APBD, banyak kepala daerah yang ditahan lantaran menyelewangkan dana tersebut.

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo menyebutkan, ada tiga daerah yang rawan korupsi DD, yakni Sumatra Utara, Madura, dan Papua. Tidak hanya daerah yang mempunyai risiko tinggi, audit secara sampling juga dilakukan tersebar di 34 provinsi dengan melibatkan BPK Provinsi.

“Jadi sampling audit berbasis risiko, jadi mana daerah-daerah yang punya potensi risiko yang tinggi. Akan coba kita lakukan serentak dengan melibatkan 34 perwakilan BPK di

daerah,” jelasnya.

Menteri Eko menyatakan, penggunaan DD diperlukan pengawasan yang baik dan terus-menerus. Dengan begitu, dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan

rakyat tidak disalahgunakan.

Menurutnya, manajemen DD itu harus betul-betul direncanakan dengan dan diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada penga-

wasan, *controlling*, pemeriksaan, yang terus menerus.

“Karena ini terkait uang yang besar sekali, sehingga tidak bisa bermain-main,” kata Menteri Eko.

Politikus PKB ini menga-

takan, saat awal diluncurkan, DD hanya dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun, dan kini pada 2017, naik jadi Rp60 triliun. **(lip/ant/mul)**